

# LAPORAN IMPLEMENTASI AKTUALISASI

**2022**

**DINAS KOPERASI UKM  
DAN PERDAGANGAN  
KOTA BONTANG**

**UPAYA MENINGKATKAN JUMLAH SERTIFIKASI NOMOR INDUK  
KOPERASI OLEH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN  
PERDAGANGAN KOTA BONTANG**

---

# LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS

## PERNYATAAN ORIGINALITAS

Saya yang bertandatangan dibawah ini,

Nama : Karresa, SE.  
NDH : 26  
NIP : 199108182022031002  
Jabatan : Analis Kerjasama dan Permodalan  
Instansi : Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan  
Perdagangan Kota Bontang

Menyatakan bahwa Laporan Implementasi Aktualisasi ini merupakan karya penulis sendiri dan bukan merupakan tiruan, salinan atau duplikat dari Laporan Aktualisasi yang sudah pernah dihasilkan melalui Pelatihan Dasar CPNS lainnya. Pernyataan ini dibuat dengan kesadaran dan penuh tanggung jawab serta bersedia menerima segala resiko jika ternyata pernyataan terbukti tidak benar.

Samarinda, 12 Juli 2022



Karresa, SE.  
NIP. 199108182022031002

# LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN IMPLEMENTASI



## LEMBAR PERSETUJUAN LAPORAN RANCANGAN AKTUALISASI

Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa Laporan Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XXI Tahun 2022 :

Nama : Karresa, S.E.  
NDH : 26  
NIP : 19910818 202203 1 002  
Jabatan : Analis Kerjasama dan Permodalan  
Instansi : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bontang  
Judul Aktualisasi : Upaya Meningkatkan Jumlah Sertifikasi Nomor Induk Koperasi Oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bontang

Telah disetujui dan LAYAK untuk diajukan dalam Seminar Laporan Rancangan Aktualisasi.

Mentor,

Drs. Yusran, M. Pd.  
NIP. 19660304 199412 1 001

Coach,

Dr. M. Muh. Harry. R  
NIP. 19851009 201101 1 012

# LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN IMPLEMENTASI



## LEMBAR PENGESAHAN LAPORAN RANCANGAN AKTUALISASI

Yang bertandatangan dibawah ini menyatakan bahwa Laporan Rancangan Aktualisasi Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Angkatan XXI Tahun 2022 :

Nama : Karresa, S.E.  
NDH : 26  
NIP : 19910818 202203 1 002  
Jabatan : Analis Kerjasama dan Permodalan  
Instansi : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bontang  
Judul Aktualisasi : Upaya Meningkatkan Jumlah Sertifikasi Nomor Induk Koperasi Oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bontang

Telah diseminarkan dalam Seminar Laporan Rancangan Aktualisasi pada 07 Juni 2022 melalui *Zoom Meeting*

Mentor,

Drs. Yusran, M. Pd.  
NIP. 19660304 199412 1 001

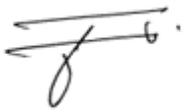
Coach,

Dr. M. Muh. Harry. R  
NIP. 19851009 201101 1 012

Penguji,

Ahmad Zaini, S.E., M.E.  
NIP. 19811001 200912 1 002

# LEMBAR KONSULTASI MENTOR

No	Hari/ Tanggal	Uraian Kegiatan	Media	Paraf Mentor
1.	Selasa, 24 Mei 2022	Berdiskusi terkait isu yang terdapat pada bidang Koperasi	Tatap Muka	
2.	Rabu, 25 Mei 2022	Melakukan diskusi terkait identifikasi masing-masing isu dan menentukan isu prioritas serta kegiatan yang akan dilaksanakan masa aktualisasi	Tatap Muka	
3.	Senin, 06 Juni 2022	Menyampaikan progress dan mempersiapkan bahan seminar rancangan	Tatap Muka	

# LEMBAR KONSULTASI COACH



## LEMBAR KONSULTASI COACH Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil

Nama : Karresa, S.E.  
NDH : 26  
Jabatan : Analis Kerjasama dan Permodalan  
Instansi : Dinas Koperasi UKM dan Perdagangan Kota Bontang  
Coach : M. Harry Rahmadi, S.Pi., M.M

No	Hari/ Tanggal	Uraian Kegiatan	Media	Paraf Coach
1.	Jumat, 27 Mei 2022	Coaching awal terkait sistematika Laporan Rancangan Aktualisasi	Zoom Meeting	
2.	Selasa, 31 Mei 2022	Membahas definisi- definisi per bab di dalam sistematika Rencana Aktualisasi	Zoom Meeting	
3	Jumat, 03 Juni 2022	Penambahan gagasan pemecahan isu	Zoom Meeting	
4	Selasa, 28 Juni	Penjelasan Sistematika Laporan Hasil Implementasi	Zoom Meeting	
5	Jumat, 15 Juli 2022	Penyampaian revisi Laporan Hasil Implementasi Aktualisasi	Tatap Muka	
6	Senin, 18 Juli 2022	Simulasi Seminar Aktualisasi	Tatap Muka	

# DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	
LEMBAR PERNYATAAN ORISINALITAS .....	i
LEMBAR PERSETUJUAN .....	ii
LEMBAR PENGESAHAN .....	iii
LEMBAR KONSULTASI MENTOR .....	iv
LEMBAR KONSULTASI COACH .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
One Page Report .....	vii
BAB I .....	1
PENDAHULUAN .....	1
1.1. Profile Instansi .....	2
1.2. Jabatan Profile .....	3
BAB II .....	4
2.1 Sikap Bela Negara .....	5
2.2 Nilai-Nilai Dasar ASN .....	7
2.3 Kedudukan dan Peran ASN Menuju Smart Governance .....	9
BAB III .....	10
IDENTIFIKASI AKTUALISASI .....	10
3.1 Latar Belakang Aktualisasi .....	11
3.2 Tujuan Aktualisasi .....	20
3.2.1 Tujuan Umum .....	20
3.2.2 Tujuan Khusus .....	20
3.3 Manfaat Aktualisasi .....	20
3.3.1 Manfaat Umum .....	20
3.3.2 Manfaat Khusus .....	20
3.4 Ruang Lingkup Aktualisasi .....	21
BAB IV Rancangan Aktualisasi .....	22
4.1 Penetapan Core Isu .....	23
4.2 Gagasan Pemecah Core Isu .....	25
4.3 Matriks Rancangan Aktualisasi .....	26
4.4 Jadwal Perencanaan Aktualisasi .....	33
BAB V IMPLEMENTASI KEGIATAN .....	34
5.1 Kegiatan 1 .....	35
5.2 Kegiatan 2 .....	38
5.3 Kegiatan 3 .....	39
5.4 Kegiatan 4 .....	41
BAB VI PENUTUP .....	44
6.1 Simpulan .....	45
6.2 Rekomendasi .....	47
DAFTAR PUSTAKA .....	48
LAMPIRAN .....	

# KATA PENGANTAR

Puji syukur terucapkan atas limpahan berkah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan serangkaian proses mulai dari tahap pembelajaran hingga penulisan Laporan Rancangan Aktualisasi dengan judul Upaya Meningkatkan Jumlah Sertifikasi Nomor Induk Koperasi Oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bontang

Dengan selesainya seluruh rangkaian Pelatihan Dasar bagi Calon Pegawai Negeri Sipil dapat mendukung perwujudan ASN Ber-AKHLAK dengan optimal. Sehingga kedepannya ASN dapat berperan lebih besar terhadap pembangunan di Indonesia.

Seluruh kegiatan ini dapat berjalan dengan lancar juga atas dukungan dan peran aktif beberapa pihak yakni :

1. Selaku Kepala Puslatbang KDOD LAN Samarinda
2. Drs. Yusran, M. Pd. selaku Kepala Bidang Koperasi dan Usaha Mikro sekaligus sebagai mentor yang selama ini membimbing dan memberi arahan sehingga kegiatan aktualisasi ini dapat berjalan dengan baik.
3. M. Harry Rahmadi, S.Pi., M.M selaku coach yang berperan aktif dalam membimbing pelaksanaan aktualisasi dan penulisan laporan hingga akhir.
4. Sebagai Narasumber yang telah meluangkan waktu untuk berdiskusi dan memberikan saran membangun demi kemajuan penulis
5. Bapak/Ibu Tutor Rustan, Lina Maulana, Radiatun Humairah dan Pak Fajar Iswahyudi yang telah sabar dan berbaik hati memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat memotivasi kami selama masa penugasan dan pembelajaran mandiri
6. Seluruh Sub Koordinator di Bidang Koperasi yang membantu memberikan pengarahan terkait kondisi instansi secara keseluruhan dan bersedia memberikan informasi yang dibutuhkan
7. Ibu, Bapak dan adik-adik yang selalu menjadi penyemangat selama masa Latsar sehingga semua proses berjalan dengan baik
8. Seluruh rekan kerja baik di Bidang Koperasi dan Usaha Mikro maupun bidang lain
9. Tak lupa kepada seluruh teman-teman Peserta Latsar CPNS Angkatan XXI, terutama Kelompok 3 yang selalu meluangkan waktu untuk berdiskusi dan saling memberi saran satu sama lain. See U on Top!

Seluruh kegiatan hingga penulisan laporan yang penulis sampaikan masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan. Penulis sangat terbuka jika terdapat kritik atau saran yang dapat membangun dan menjadi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga semua ilmu dan pengalaman berharga yang penulis dapatkan selama mengikuti kegiatan Latsar CPNS ini dapat menjadi pedoman sebagai ASN yang amanah mengemban tugas dan membawa manfaat bagi banyak orang.

Bontang, 06 Juni 2022

Penulis



Karresa, S.E.

# ONE PAGE REPORT

## UPAYA MENINGKATKAN JUMLAH SERTIFIKASI NOMOR INDUK KOPERASI OLEH DINAS KOPERASI, USAHA KECIL MENENGAH DAN PERDAGANGAN KOTA BONTANG

### ISU :

Masih ada 29 Koperasi yang belum memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)

### TUJUAN KHUSUS :

Tujuan Khusus aktualisasi kegiatan ini adalah menyelesaikan isu yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bontang khususnya bidang Koperasi yaitu Masih ada beberapa Koperasi yang belum memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk persyaratan membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Izin Usaha Simpan Pinjam (SIUSP).

### MANFAAT KHUSUS :

- Meningkatkan pengetahuan tentang pengawasan Koperasi
- Meningkatkan Pengetahuan tentang kelembagaan koperasi
- Meningkatkan kreativitas dalam pembuatan kegiatan yang mendukung gagasan pemecah isu

## QR code Video Aktualisasi



NAMA : Karresa

NDH : 26

WA : 082254407296

EMAIL : karresa100@gmail.com

## GAGASAN :



### Kegiatan 1 :

Menganalisa penyebab koperasi yang belum memiliki Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi).



### Kegiatan 2 :

Sosialisasi tentang pentingnya Sertifikat NIK bagi koperasi

**SERTIFIKAT NOMOR  
INDUK KOPERASI  
(NIK) ?**



### Kegiatan 3 :

Sosialisasi tentang pentingnya Sertifikat NIK bagi koperasi



### Kegiatan 4 :

Membuat Booklet untuk memberikan wawasan terhadap pengurus maupun pengelola Koperasi di Kota Bontang

---

# BAB I

---

# PENDAHULUAN

01

PROFIL INSTANSI

02

PROFIL JABATAN



# PROFIL INSTANSI

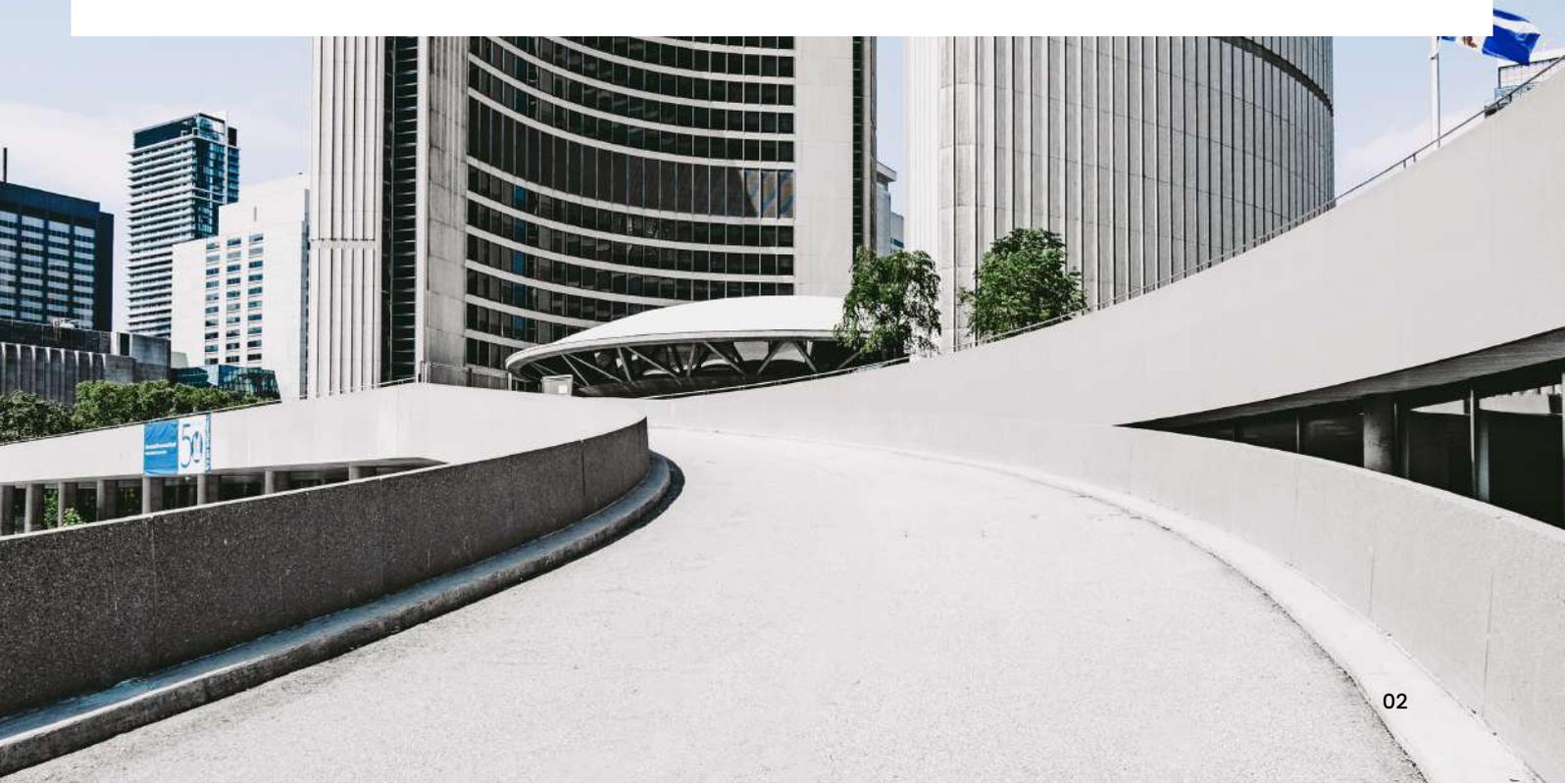


Menurut Peraturan Walikota Bontang nomor 47 Tahun 2018, Bidang Koperasi dan usaha mikro mempunyai tugas menyelenggarakan urusan koperasi dan usaha mikro berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam melaksanakan tugas, Bidang Koperasi dan usaha mikro menyelenggarakan fungsi:

- a. Perencanaan program kerja bidang koperasi dan usaha mikro;
- b. Pengorganisasian dan pembinaan kepada bawahan;
- c. Penyelenggaraan urusan koperasi dan usaha mikro;
- d. Pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang koperasi dan usaha mikro; dan
- e. Pelaksanaan fungsi lain terkait dengan tugas dan fungsi bidang koperasi dan usaha mikro

Bidang Koperasi, terdiri atas :

1. Seksi Kelembagaan Perizinan Koperasi dan Perizinan Usaha Mikro
2. Seksi Usaha dan Pembiayaan Koperasi
3. Seksi Pengawasan dan Pembinaan Usaha Mikro



# PROFIL JABATAN

Sebagai CPNS Analis Kerjasama dan Permodalan yang ditempatkan pada Seksi Pengawasan dan Pembinaan Usaha Mikro Bidang Koperasi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan, penulis mempunyai uraian tugas yang tertera di Sasaran Program Kerja Tahunan sebagai berikut :

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja
1	Menganalisa Hasil Monitoring dan Evaluasi kelembagaan dan Usaha Koperasi (SIUSIP) TERHADAP 35 KSP dan USP per Tahun	Tersedianya laporan analisa Hasil monitoring dan Evaluasi.
2	Menganalisa Hasil Advokasi dan Mediasi	Tersedianya laporan hasil analisa advokasi dan mediasi
3	Menganalisa pelaporan keuangan koperasi per triwulan	Tersedianya laporan hasil analisa keuangan koperasi per triwulan
4	Menganalisa hasil penilaian kesehatan KSP dan USP Tahun Buku 2021	Tersedianya laporan hasil analisa penilaian kesehatan KSP dan USP Tahun Buku 2021
5	Menganalisa Laporan Hasil Penilaian Penghargaan koperasi berprestasi/ award tingkat Kab/Kota	Tersedianya laporan hasil analisa Penilaian Penghargaan koperasi berprestasi/ award tingkat Kab/Kota

---

# BAB II

# KILAS PEMBELAJARAN AGENDA

01

Sikap Bela Negara

02

Nilai-nilai Dasar ASN

03

Kedudukan Peran  
ASN Menuju Smart  
ASN

# Sikap Bela Negara

Bela Negara adalah sikap dan perilaku warga Negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada Negara dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan Negara. Selain sebagai kewajiban dasar, upaya bela Negara juga merupakan kehormatan bagi setiap warga Negara. Pembelaan Negara sepatutnya dilaksanakan dengan penuh kesadaran, tanggung jawab, dan rela berkorban demi pengabdian kepada bangsa dan Negara.

Pengertian usaha bela Negara ialah upaya mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman maupun serangan musuh, yang hakikatnya merupakan upaya warga Negara untuk mempertahankan dan memajukan bangsa Indonesia dari segala bidang. Bela Negara diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara, sebagai pengganti UU Nomor : 20 Tahun 1982 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Pertahanan Keamanan Republik Indonesia.

Dalam mencapai tujuan negara, sebagai ASN akan terus ikut mewujudkan tujuan negara ketiga dan keempat terutama dalam lingkungan kerja sekitar baik rekan kerja, atasan maupun bawahan. Ikut berpartisipasi aktif mewujudkan tujuan negara dengan melaksanakan tugas sesuai profesi, diharapkan tujuan negara dapat terwujud. Untuk menjaga kualitas kesiapan dan kesiagaan untuk mendeteksi dan mengantisipasi segala bentuk potensi AGHT, diperlukan kewaspadaan yang dimulai dari kewaspadaan diri pribadi, yang dikembangkan menjadi waspada keluarga, dan waspada lingkungan kerja. Bentuk kewaspadaan dimulai dari pengawasan terhadap diri pribadi terhadap potensi AGHT yang dapat timbul dari interaksi sosial.

Pengawasan terhadap diri pribadi, yang dikembangkan pengawasan dan kepedulian terhadap lingkungan keluarga, kerja, dan lingkungan yang lebih luas diharapkan waspada nasional akan tercapai dan keamanan nasional dapat terjaga.

# Sikap Bela Negara

ASN diharapkan memiliki sikap bela negara dan cinta tanah air sesuai konsepsi bela negara. Perwujudan bela negara adalah melalui pelaksanaan tugas sebaik-baiknya sesuai profesi ASN. Partisipasi aktif terhadap perubahan lingkungan strategis, mendiagnosa berbagai permasalahan, serta mengelola perubahan merupakan hal yang harus dilakukan. Dalam pelaksanaan tugas tetap menghormati kearifan lokal sebagai bentuk wawasan nusantara.

Hal yang lebih utama adalah nilai-nilai Pancasila tetap menjadi pedoman bekerja dan falsafah kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Implementasi nilai-nilai Pancasila, bela Negara, dan cinta tanah air tidak hanya dalam pelaksanaan tugas namun sebagai pejabat pengawas harus memberikan contoh dan memantau perkembangan bawahan dan rekan kerja sekitar terhadap penerapan nilai-nilai Pancasila, UUD 1945, dan wawasan kebangsaan.

# Nilai-Nilai Dasar ASN

Definisi dari pelayanan publik sebagaimana tercantum dalam UU Pelayanan Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Hingga saat ini, potret birokrasi kita masih belum baik. Birokrasi lebih banyak berkonotasi dengan citra negatif seperti rendahnya kualitas pelayanan publik, berperilaku korup, kolusif dan nepotis, masih rendahnya profesionalisme dan etos kerja, mahal nya biaya yang harus dikeluarkan masyarakat dalam pengurusan pelayanan publik, proses pelayanan yang berbelit-belit, hingga muncul jargon “KALAU BISA DIPERSULIT KENAPA DIPERMUDAH”. Selama ini permasalahan penyelenggaraan pelayanan publik di Indonesia sangat berkaitan erat dengan proses pelayanan publik yang diberikan oleh penyelenggara, baik dari sisi prosedur, persyaratan, waktu, biaya dan fasilitas pelayanan, yang dirasakan masih belum memadai dan jauh dari harapan masyarakat.

Pelayanan publik yang berkualitas harus berorientasi kepada pemenuhan kepuasan pengguna layanan. Apabila dikaitkan dengan tugas ASN dalam melayani masyarakat, pelayanan yang berorientasi pada customer satisfaction adalah wujud pelayanan yang terbaik kepada masyarakat atau dikenal dengan sebutan pelayanan prima. Pelayanan prima didasarkan pada implementasi standar pelayanan yang dimiliki oleh penyelenggara.

Berdasarkan Surat Edaran (SE) Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021 tanggal 26 Agustus 2021 tentang Implementasi Core Values dan Employer Branding Aparatur Sipil Negara, disebutkan bahwa dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (World Class Government), Pemerintah telah meluncurkan Core Values (Nilai-Nilai Dasar) ASN BerAKHLAK dan Employer Branding (Bangga Melayani Bangsa).

# Nilai-Nilai Dasar ASN

Dalam rangka penguatan budaya kerja sebagai salah satu strategi transformasi pengelolaan ASN menuju pemerintahan berkelas dunia (World Class Government), Pemerintah telah meluncurkan Core Values (Nilai-Nilai Dasar) ASN BerAKHLAK dan Employer Branding (Bangga Melayani Bangsa). Core Values ASN BerAKHLAK merupakan akronim dari Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif. Core Values tersebut seharusnya dapat dipahami dan dimaknai sepenuhnya oleh seluruh ASN serta dapat diimplementasikan dalam pelaksanaan tugas dan kehidupan sehari-hari.

Oleh karena tugas pelayanan publik yang sangat erat kaitannya dengan pegawai ASN, sangatlah penting untuk memastikan bahwa ASN mengedepankan nilai Berorientasi Pelayanan dalam pelaksanaan tugasnya, yang dimaknai bahwa setiap ASN harus berkomitmen memberikan pelayanan prima demi kepuasan masyarakat.

# Kedudukan Peran ASN Menuju Smart Governance

Aparatur Sipil Negara mempunyai peran yang amat penting dalam rangka menciptakan masyarakat madani yang taat hukum, berperadaban modern, demokratis, makmur, adil, dan bermoral tinggi dalam menyelenggarakan pelayanan kepada masyarakat secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang Undang Dasar Tahun 1945. Kesemuanya itu dalam rangka mencapai tujuan yang dicita-citakan oleh bangsa Indonesia.

Kedudukan atau status jabatan PNS dalam sistem birokrasi selama ini dianggap belum sempurna untuk menciptakan birokrasi yang profesional. Untuk dapat membangun profesionalitas birokrasi, maka konsep yang dibangun dalam UU ASN tersebut harus jelas. Berikut beberapa konsep yang ada dalam UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara. Berdasarkan jenisnya, Pegawai ASN terdiri atas:

Pegawai Negeri Sipil (PNS) yaitu merupakan warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai ASN secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan, memiliki nomor induk pegawai secara nasional. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) yaitu warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan kebutuhan Instansi Pemerintah untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.

Kedudukan ASN berada di pusat, daerah, dan luar negeri. Kesatuan bagi ASN ini sangat penting, mengingat dengan adanya desentralisasi dan otonomi daerah, sering terjadi adanya isu putra daerah yang hampir terjadi dimana-mana sehingga perkembangan birokrasi menjadi stagnan di daerah-daerah. Kondisi tersebut merupakan ancaman bagi kesatuan bangsa. Untuk menjalankan kedudukannya tersebut, maka Pegawai ASN berfungsi sebagai berikut:

Pelaksana kebijakan public yaitu melaksanakan kebijakan yang dibuat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan Pelayan publik yaitu memberikan pelayanan public yang profesional dan berkualitas Perikat dan pemersatu bangsa yaitu mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

# BAB III

# IDENTIFIKASI AKTUALISASI

01

Latar Belakang  
Aktualisasi

02

Tujuan Aktualisasi

03

Manfaat  
Aktualisasi

04

Ruang Lingkup  
Aktualisasi



# LATAR BELAKANG AKTUALISASI

Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah Dan Perdagangan Kota Bontang melalui Peraturan Walikota Bontang Nomor 47 Tahun 2018 mengatur terkait Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bontang. Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bontang mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan bidang koperasi, usaha kecil menengah, Perdagangan. Salah satu bidang yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bontang ialah Bidang Koperasi yang mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang kelembagaan dan pemberdayaan koperasi.

Dalam menjalankan seluruh fungsi di atas tersebut terdapat beberapa masalah atau isu-isu yang dihadapi oleh Bidang Koperasi. Hal ini disebabkan oleh adanya ketidaksesuaian kondisi yang terjadi dengan manajemen organisasi yang ada. Penanganannya dapat dilakukan dengan banyak cara, tergantung pada seberapa besar potensi isu yang muncul mempengaruhi organisasi tersebut. Berdasarkan penjelasan yang disampaikan di atas dan apabila dikaitkan dengan fungsi Bidang Koperasi di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bontang serta melalui diskusi dengan mentor terdapat beberapa isu/permasalahan sesuai dengan SKP penulis yang dikelompokkan di bawah ini :

# Isu/Permasalahan di Kantor

1

Belum optimalnya pelayanan aduan koperasi

2

Form keragaan koperasi masih hardcopy dan pengisian manual

3

Masih ada 29 Koperasi yang belum memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)



# Belum Optimal nya Pelayanan Aduan dari Masyarakat

## Dampak Permasalahan

- a. Masyarakat maupun anggota koperasi yang merasa dirugikan oleh koperasi tidak akan melapor ke Dinas Koperasi, UKM dan Perdagangan (DKUKMP) kota Bontang, mereka langsung melaporkan ke pihak kepolisian.
- b. Hilangnya kepercayaan masyarakat terhadap DKUKMP kota Bontang.

# Belum Optimal nya Pelayanan Aduan dari Masyarakat

## Alternatif Solusi

- a. Adanya mekanisme pengaduan koperasi yang jelas sehingga dapat diinformasikan ke masyarakat maupun anggota koperasi dan pelayanan pengaduan koperasi yang lebih efektif dan efisien.
- b. Adanya form online terkait pengaduan dari masyarakat maupun anggota koperasi.
- c. Form Online dalam bentuk goggle form yang terintegrasi ke Ms. Excel

# Form keragaan koperasi masih hardcopy dan pengisian manual

## Dampak Permasalahan

- a. Arsip terkait form keragaan Koperasi tidak tersentralisasi.
- b. Pekerjaan menjadi tidak efektif dan tidak efisien.

# Form keragaan koperasi masih hardcopy dan pengisian manual

## Alternatif Solusi

- a. Adanya form online keragaan koperasi sehingga lebih efektif dan efisien.
- b. Form Online dalam bentuk goggle form yang terintegrasi ke Ms. Excel

# Masih ada 29 Koperasi yang belum memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)

## Dampak Permasalahan

- a. Koperasi yang belum memiliki sertifikat NIK tidak dapat mengurus legalitas perizinan lainnya seperti NIB dan SIUSP.
- b. Koperasi yang belum memiliki sertifikat NIK tidak dapat mengajukan syarat permohonan kredit perbankan dan lembaga non bank
- c. Koperasi yang belum memiliki sertifikat NIK tidak dapat mengajukan syarat pemberian rekomendasi usulan program dari Pemerintah Pusat dan Daerah.

# Masih ada 29 Koperasi yang belum memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)

## Alternatif Solusi

- a. Menganalisa penyebab koperasi yang belum memiliki Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi)
- b. Sosialisasi tentang pentingnya Sertifikat NIK bagi koperasi Membuat Booklet terkait alur pembuatan Sertifikat NIK
- c. Membuat video tentang Manfaat Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)
- d. Membuat Booklet untuk memberikan wawasan terhadap pengurus maupun pengelola Koperasi di Kota Bontang

Jika melihat uraian diatas maka isu yang akan difokuskan dalam kegiatan aktualisasi adalah terkait dengan poin 3 dengan judul aktualisasi “Upaya Meningkatkan Jumlah Sertifikasi Nomor Induk Koperasi Oleh Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bontang”.



# Tujuan dan Manfaat Aktualisasi

## Tujuan Umum

Tujuan umum aktualisasi dalam rangkaian kegiatan Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil ini adalah untuk mengidentifikasi dan mengaktualisasi nilai-nilai dasar Ber-AKHLAK PNS (Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif dan Kolaboratif) serta kedudukan dan peran PNS dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

## Tujuan Khusus

Tujuan Khusus aktualisasi kegiatan ini adalah menyelesaikan isu yang ada di Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bontang khususnya bidang Koperasi yaitu Masih ada beberapa Koperasi yang belum memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) untuk persyaratan membuat Nomor Induk Berusaha (NIB) dan Surat Izin Usaha Simpan Pinjam (SIUSP).

## Manfaat Umum

Manfaat Umum yang diperoleh dari kegiatan aktualisasi adalah mewujudkan ASN yang professional, yang mampu melaksanakan tugas dan perannya sebagai pelayan masyarakat dan menerapkan core value ASN BerAKHLAK (Berorientasi pelayanan, Akuntabel, kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif).

## Manfaat Khusus

- a. Meningkatkan pengetahuan tentang pengawasan Koperasi
- b. Meningkatkan Pengetahuan tentang kelembagaan koperasi
- c. Meningkatkan kreativitas dalam pembuatan kegiatan yang mendukung gagasan pemecah isu

# Ruang Lingkup Aktualisasi

1.	Penerapan nilai-nilai dasar profesi ASN dengan mengaktualisasikan nilai Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif serta kedudukan dan peran PNS dalam NKRI yaitu Whole of Government, Manajemen ASN, dan Smart ASN berdasarkan isu yang diangkat dan kegiatan pemecahan masalah;
2.	Pelaksanaan aktualisasi dilakukan di kantor Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bontang;
3.	Pelaksanaan aktualisasi dilakukan di beberapa koperasi di kota Bontang;
4.	Waktu pelaksanaan aktualisasi terhitung mulai tanggal 8 Juni sampai tanggal 09 Juli 2022.

# BAB IV

# RANCANGAN AKTUALISASI

01

Penetapan Core  
Isu

02

Gagasan Pemecah  
Core Isu

03

Matriks  
Rancangan  
Aktualisasi

04

Jadwal  
Perencanaan  
Aktualisasi



# PENETAPAN CORE ISU

Sesuai dengan identifikasi isu kontemporer di Bab III, akan dilaksanakan analisis isu yang paling dominan. Analisis yang dilakukan dalam penetapan isu kontemporer ini menggunakan metode analisis urgency, seriousness, growth (USG). Metode USG merupakan salah satu cara menetapkan urutan prioritas masalah dengan metode teknik scoring. Metode USG dilaksanakan dengan memperhatikan urgensi dari masalah, keseriusan masalah yang dihadapi, serta kemungkinan perkembangan masalah yang semakin besar dengan menentukan skala nilai 1-5. Isu yang memiliki skor tertinggi merupakan isu prioritas yang dapat ditarik kesimpulannya untuk dijadikan isu kontemporer.

Berikut ini adalah analisis isu kontemporer menggunakan analisis urgency, seriousness, growth (USG) :

No	Identifikasi Isu	U	S	G	Total
1	Belum optimalnya pelayanan aduan koperasi	4	4	4	12
2	Form keragaan koperasi masih hardcopy dan pengisian manual	4	4	3	11
3	Masih ada 29 Koperasi yang belum memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	5	5	4	14

# PENETAPAN CORE ISU

Berdasarkan analisis isu-isu kontemporer yang terjadi di Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bontang dengan menggunakan metode USG di atas, maka disimpulkan bahwa isu tentang Masih ada 29 Koperasi yang belum memiliki Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK), memenuhi semua kriteria Urgency, Seriousness, Growth serta menjadi patut untuk diangkat disebabkan memiliki skor yang paling tinggi daripada isu lainnya.

Dalam menjalankan usahanya, koperasi memiliki nomor induk. Nomor Induk Koperasi (NIK) adalah kombinasi angka unik yang dimiliki oleh Koperasi sebagai identitas koperasi. Nomor Induk Koperasi diberikan dalam bentuk Sertifikat Nomor Induk Koperasi yang dilengkapi dengan QR Code, kelompok jenis dan skala usaha serta peringkat koperasi. Hal ini diatur dalam Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.KUKM/VI/2016 Tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah (Permen KUKM 10/2016).

Fungsi sertifikat NIK sesuai dengan Pasal 18 ayat (1) Permen KUKM 10/2016, adalah:

1. Memberikan kepastian eksistensi koperasi secara sah sebagai badan hukum;
2. Memastikan koperasi masih aktif secara kelembagaan maupun usaha; dan
3. Meningkatkan kepercayaan masyarakat dan para pihak yang bermitra terhadap koperasi.

Selanjutnya terdapat 8 kegunaan sertifikat NIK bagi koperasi, yang tertuang pada Pasal 18 ayat (2) Permen KUKM 10/2016:

1. Klasifikasi koperasi berdasarkan jenis dan skala usaha koperasi;
2. Pemingkatan koperasi berdasarkan kesehatan usaha dan kepatuhan terhadap nilai dan prinsip koperasi;
3. Pemberian rekomendasi atas usulan program-program pemerintah dan daerah sesuai dengan klasifikasi dan peringkat koperasi;
4. Permohonan kredit perbankan dan lembaga non bank;
5. Permohonan penjaminan kredit;
6. Permohonan izin usaha baru;
7. Permohonan keikutsertaan dalam pameran dan promosi dagang; dan
8. Kegunaan lain yang memerlukan kepastian keberadaan Koperasi dari segi legalitas badan hukum dan usahanya.

Dilihat dari uraian diatas, DKUKMP khususnya bidang koperasi akan berupaya dalam meningkatkan kesadaran koperasi yang belum memiliki Sertifikat NIK agar koperasi dapat berjalan sesuai regulasi. Maka dari itu perlu adanya edukasi dalam bentuk sosialisasi, booklet maupun video untuk meningkatkan kesadaran pengurus ataupun pengelola koperasi dalam hal kepemilikan Sertifikat NIK bagi koperasinya.

# GAGASAN PEMECAH CORE ISU

Dalam upaya tercapainya kegiatan yang maksimal sebagai uraian lebih lanjut mengenai judul yang telah ditetapkan, penulis membuat gagasan pemecahan isu adalah sebagai berikut:

1. Menganalisa penyebab koperasi yang belum memiliki Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi).

Kegiatan ini dilaksanakan dengan menggunakan metode wawancara tatap muka atau daring kepada pengurus dan pengelola koperasi yang belum memiliki sertifikat NIK. Instrumen wawancara terkait dengan permasalahan yang dihadapi koperasi sehingga belum memiliki Sertifikat NIK.

2. Sosialisasi tentang pentingnya Sertifikat NIK bagi koperasi.

Kegiatan ini dilakukan untuk membangun kesadaran kepada pengurus ataupun pengelola koperasi agar memiliki kesadaran bahwasanya Sertifikat NIK itu syarat penting dalam menjalankan aktifitas perkoperasian. Sosialisasi ini dilakukan dengan mengunjungi koperasi-koperasi yang belum memiliki Sertifikat NIK.

3. Membuat video tentang Manfaat Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK).

Membuat video terkait manfaat Sertifikat NIK sebagai bentuk edukasi kepada pengurus ataupun pengelola koperasi untuk selalu menjaga keberlangsungan hidup koperasi. Video ini dikemas dalam bentuk animasi tulisan tangan atau video scribing, karena lebih mudah proses pembuatannya dan juga lebih menarik dalam menyajikan konten yang dapat mudah diserap oleh penonton.

4. Membuat Booklet untuk memberikan wawasan terhadap pengurus maupun pengelola Koperasi di Kota Bontang.

Booklet ini berisikan tentang alur prosedur dalam membuat Sertifikat NIK. Dari tahapan pengajuan hingga penerbitan akan tersaji dalam booklet tersebut. Penyebarannya melalui grup Whatsapp atau langsung ke koperasi yang belum memiliki Sertifikat NIK

# MATRIKS RANCANGAN AKTUALISASI

## Kegiatan 1

### Menganalisa penyebab koperasi yang belum memiliki Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi)

NO	TAHAPAN	Output/Hasil Kegiatan	Keterkaitan dengan nilai dasar
1	Menganalisa penyebab koperasi yang belum memiliki Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi)	Hasil Analisa penyebab koperasi yang belum memiliki Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi)	Harmonis Membangun lingkungan kerja yang kondusif.
2	Menyusun pertanyaan hasil konsultasi	Hasil Analisa penyebab koperasi yang belum memiliki Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi)	Kolaboratif Bekerja sama dengan rekan bidang koperasi dalam mengumpulkan data.
3	Meminta persetujuan atasan atas draft yang telah disusun	Hasil Analisa penyebab koperasi yang belum memiliki Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi)	Akuntabel Membuat pelaporan hasil analisa yang dapat dipertanggung jawabkan.
4	Menghubungi pihak koperasi yang akan diwawancarai	Hasil Analisa penyebab koperasi yang belum memiliki Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi)	Loyal Membuat daftar pertanyaan yang sesuai dengan permasalahan untuk menjaga nama baik instansi.

# MATRIKS RANCANGAN AKTUALISASI

## Kegiatan 1

### Menganalisa penyebab koperasi yang belum memiliki Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi)

NO	TAHAPAN	Output/Hasil Kegiatan
5	Melakukan wawancara kepada pengurus/ pengelola koperasi yang bersangkutan	Hasil Analisa penyebab koperasi yang belum memiliki Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi)
6	Memetakan permasalahan yang dihadapi koperasi.	Hasil Analisa penyebab koperasi yang belum memiliki Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi)
7	Melaporkan hasil pemetaan permasalahan ke atasan langsung	Hasil Analisa penyebab koperasi yang belum memiliki Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi)

# MATRIKS RANCANGAN AKTUALISASI

## Kegiatan 2 Sosialisasi tentang pentingnya Sertifikat NIK bagi koperasi

NO	TAHAPAN	Output/Hasil Kegiatan	Keterkaitan dengan nilai dasar
1	Berkonsultasi dengan mentor	Terlaksananya Sosialisasi	Harmonis Berkoordinasi dengan koperas-koperasi yang akan dikunjungi
2	Menyusun atau mengumpulkan materi yang akan dijadikan materi sosialisasi	Terlaksananya Sosialisasi	Berorientasi Pelayanan Berkomitmen melayani masyarakat dengan menyusun materi sosialisasi dengan kebutuhan masyarakat dalam hal koperasi yang belum memiliki Sertifikat NIK
3	Meminta persetujuan atasan atas draft sosialisasi	Terlaksananya Sosialisasi	Kompeten Meningkatkan kompetensi diri dengan mencari referensi materi sosialisasi
4	Menentukan koperasi yang akan dilakukan sosialisasi	Terlaksananya Sosialisasi	Adaptif Menyesuaikan diri dengan koperasi yang menjadi target sosialisasi.

# MATRIKS RANCANGAN AKTUALISASI

## Kegiatan 2 Sosialisasi tentang pentingnya Sertifikat NIK bagi koperasi

NO	TAHAPAN	Output/Hasil Kegiatan
5	Menyampaikan materi sosialisasi kepada koperasi yang bersangkutan	Terlaksananya Sosialisasi
6	Membuat laporan hasil kegiatan sosialisasi	Terlaksananya Sosialisasi

# MATRIKS RANCANGAN AKTUALISASI

## Kegiatan 3

### Membuat video tentang Manfaat Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)

NO	TAHAPAN	Output/Hasil Kegiatan	Keterkaitan dengan nilai dasar
1	Berkonsultasi dengan mentor	Video tentang Manfaat Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	Akuntabel Mencantumkan sumber referensi video
2	Mengumpulkan referensi video	Video tentang Manfaat Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	Kolaboratif Melibatkan rekan kerja dalam pembuatan video
3	Mempelajari cara pembuatan video	Video tentang Manfaat Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	Kompeten Mempelajari cara pembuatan video untuk mengoptimalkan penggunaan teknologi
4	Menyusun konten yang akan dimuat pada video	Video tentang Manfaat Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)	

# MATRIKS RANCANGAN AKTUALISASI

## Kegiatan 3

### Membuat video tentang Manfaat Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)

NO	TAHAPAN	Output/Hasil Kegiatan
5	Pembuatan video	Video tentang Manfaat Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)
6	Berdiskusi dengan rekan kerja yang bersangkutan terkait hasil pembuatan video	Video tentang Manfaat Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)
7	Meminta persetujuan atasan atas publikasi video	Video tentang Manfaat Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)
8	Melakukan publikasi video melalui beberapa media sosial elektronik	Video tentang Manfaat Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK)

# MATRIKS RANCANGAN AKTUALISASI

## Kegiatan 4

### Membuat Booklet untuk memberikan wawasan terhadap pengurus maupun pengelola Koperasi di Kota Bontang

NO	TAHAPAN	Output/Hasil Kegiatan	Keterkaitan dengan nilai dasar
1	Membuat Booklet yang memuat alur prosedur pembuatan Sertifikat NIK	Booklet informasi alur pembuatan Sertifikat NIK	Adaptif Menyebarkan Booklet melalui grup whatsapp agar penyampaian informasi lebih optimal
2	Menyebarkan Booklet melalui grup WA atau langsung ke koperasi yang belum memiliki Sertifikat NIK	Booklet informasi alur pembuatan Sertifikat NIK	Kompeten Meningkatkan kompetensi diri dalam membuat booklet untuk memberikan informasi
			Kolaboratif Memberikan ruang bagi orang lain

# JADWAL PERENCANAAN AKTUALISASI

NO	Kegiatan	Tanggal Kegiatan
1	Menganalisa penyebab koperasi yang belum memiliki Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi)	08- 15 Juni 2022
2	Sosialisasi tentang pentingnya Sertifikat NIK bagi koperasi	16- 23 Juni 2022
3	Membuat video tentang Manfaat Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK) bagi Koperasi	24 Juni- 01 Juli Agustus 2022
4	Membuat Booklet untuk memberikan wawasan terhadap pengurus maupun pengelola Koperasi di Kota Bontang	01 Juli – 9 Juli 2022

# BAB V

## IMPLEMENTASI AKTUALISASI

01

Menganalisa penyebab koperasi yang belum memiliki Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi).

02

Sosialisasi tentang pentingnya Sertifikat NIK bagi koperasi

03

Membuat video tentang Manfaat Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK).

04

Membuat Booklet untuk memberikan wawasan terhadap pengurus maupun pengelola Koperasi di Kota Bontang

# Menganalisa penyebab koperasi yang belum memiliki Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi)

## a. Konsultasi dan koordinasi dengan rekan-rekan Bidang koperasi.

Sebelum memulai kegiatan pertama yaitu menganalisa penyebab koperasi yang belum memiliki sertifikat NIK, terlebih dahulu berkonsultasi dan berkoordinasi dengan rekan-rekan bidang koperasi untuk memahami pembuatan instrumen pertanyaan yang akan diberikan kepada pengurus atau pengelola koperasi yang belum memiliki sertifikat NIK



## b. Menyusun pertanyaan hasil konsultasi.

## c. Meminta persetujuan atasan atas draft yang telah disusun.

Atasan menyetujui pertanyaan yang saya buat

## d. Menghubungi pihak koperasi yang akan diwawancarai.

Koperasi yang bersedia untuk diwawancarai yaitu koperasi Bina Mitra Bontang, koperasi Mekarsari, Kopkar PT. KAD, koperasi Muslimat Nisa. Koperasi Surya Lestari

## e. Melakukan wawancara kepada pengurus/pengelola koperasi yang bersangkutan

Wawancara ini dilakukan melalui via telpon dan melalui aplikasi google form dikarenakan keterbatasan waktu dari pihak koperasi.



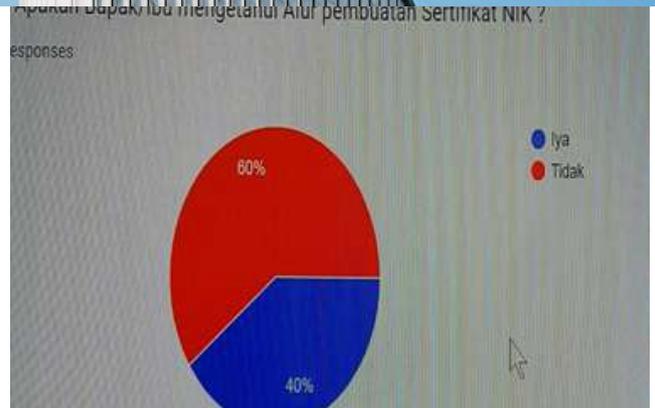
# Menganalisa penyebab koperasi yang belum memiliki Sertifikat NIK (Nomor Induk Koperasi)

## f. Memetakan permasalahan yang dihadapi koperasi

Dari pertanyaan tersebut. Kendalanya adalah koperasi belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sehingga belum dapat membuat sertifikat nik atau mengupdate sertifikat nik bagi koperasi yang sudah memiliki sertifikat nik. Karena RAT adalah syarat utama untuk mengajukan sertifikat nik yang berlaku

## g. Melaporkan hasil pemetaan permasalahan ke atasan langsung.

Hasil dari jawaban koperasi yang belum memiliki sertifikat NIK akan dijadikan bahan evaluasi dalam meningkatkan jumlah sertifikat NIK pada koperasi di kota Bontang ke depannya.



Kendala	Solusi
Kurang antusiasnya pengurus koperasi dalam menjawab pertanyaan dalam bentuk google form yang telah diberikan melalui grup WA koperasi Bontang	Terlebih dahulu sebelum menjalankan kegiatan 1, harus membangun ikatan emosional terhadap koperasi yang dituju.

# Sosialisasi tentang pentingnya Sertifikat NIK bagi koperasi

## a. Berkonsultasi dengan mentor.

Sebelum memulai kegiatan kedua yaitu Sosialisasi tentang pentingnya sertifikat NIK bagi koperasi terlebih dahulu berkonsultasi dengan Mentor agar kegiatan berjalan lancar.

## b. Menyusun atau mengumpulkan materi yang akan dijadikan materi sosialisasi.

Tahapan ini bertujuan untuk mempersiapkan hal-hal apa saja yang akan di sampaikan kepada pengurus atau pengelola koperasi.

## c. Meminta persetujuan atasan atas draft sosialisasi

Setelah menyelesaikan materi sosialisasi, terlebih dahulu meminta persetujuan atasan terkait draft sosialisasi agar dapat dipertanggung jawabkan.

## d. Menentukan koperasi yang akan dilakukan sosialisasi.

Target sosialisasi adalah koperasi yang belum memiliki sertifikat NIK. Sosialisasi ini adalah bentuk edukasi terkait pentingnya sertifikat NIK dalam menjalankan aktifitas perkoperasian.

## e. Menyampaikan materi sosialisasi kepada koperasi yang bersangkutan

Materi sosialisasi berupa booklet dan video yang di buat di kegiatan 3 dan 4. Koperasi yang telah dikunjungi hanya 5 koperasi yaitu Koperasi Bina Mitra Bontang, Koperasi Muslimat Nisa, Koperasi Mekarsari, Koperasi PT. KAD.



# Sosialisasi tentang pentingnya Sertifikat NIK bagi koperasi

Kegiatan ini dilakukan untuk membangun kesadaran kepada pengurus ataupun pengelola koperasi agar memiliki kesadaran bahwasanya Sertifikat NIK itu syarat penting dalam menjalankan aktifitas perkoperasian. Sosialisasi ini dilakukan dengan mengunjungi beberapa koperasi yang belum memiliki Sertifikat NIK.



Kendala	Solusi
<p>Sibuk mengurus perusahaan di pekerjaannya dan perusahaan diluar, koperasi dianggap bukan hal yang utama dalam pikiran, sikap dan perilakunya sehingga sulit untuk mengatur jadwal pertemuan dalam agenda sosialisasi.</p>	<p>Waktu yang lebih panjang dalam mengatur jadwal pertemuan dengan koperasi-koperasi yang belum memiliki Sertifikat NIK</p>

# Membuat video tentang Manfaat Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK).

## a. Berkonsultasi dengan mentor.

Sebelum membuat video, terlebih dahulu saya berkonsultasi dengan mentor agar konten video tersebut memuat informasi yang baik dan benar sesuai peraturan-peraturan yang terkait.

## b. Mengumpulkan referensi video

Dalam membuat konten terlebih dahulu kita harus mencari referensi agar edukasi yang disampaikan melalui video tersebut tersampaikan dengan baik dan benar.

## c. Mempelajari cara pembuatan video.

Setelah kita mendapatkan referensi, pada tahapan ini penulis mempelajari cara pembuatan video yang dikemas menarik agar mudah diserap oleh pengurus koperasi.

## d. Menyusun konten yang akan dimuat pada video.

## e. Pembuatan video.

## f. Berdiskusi dengan rekan kerja yang bersangkutan terkait hasil pembuatan video.

## g. Meminta persetujuan atasan atas publikasi video.

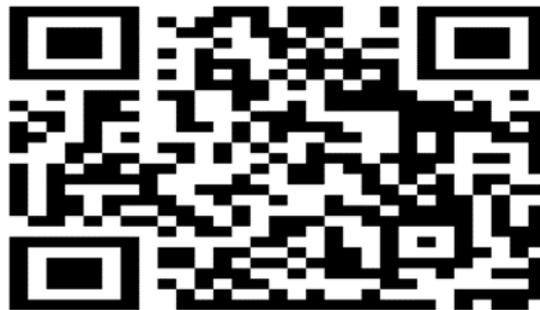
## h. Melakukan publikasi video melalui beberapa media sosial elektronik



# Membuat video tentang Manfaat Sertifikat Nomor Induk Koperasi (NIK).

Di dalam agenda kegiatan sosialisasi, saya memberikan video tentang Penting nya Sertifikat NIK.

Membuat video terkait manfaat Sertifikat NIK sebagai bentuk edukasi kepada pengurus ataupun pengelola koperasi untuk selalu menjaga keberlangsungan hidup koperasi. Video ini dikemas dalam bentuk animasi tulisan tangan atau video scribing, karena lebih mudah proses pembuatannya dan juga lebih menarik dalam menyajikan konten yang dapat mudah diserap oleh penonton. Barcode Video tertera di bawah ini :



# Membuat Booklet untuk memberikan wawasan terhadap pengurus maupun pengelola Koperasi di Kota Bontang.

a. Membuat Booklet yang memuat alur prosedur pembuatan Sertifikat NIK.

b. Menyebarkan Booklet melalui grup WA atau langsung ke koperasi yang belum memiliki Sertifikat NIK

Booklet ini berisikan tentang alur prosedur dalam membuat Sertifikat NIK. Dari tahapan pengajuan hingga penerbitan akan tersaji dalam booklet tersebut. Penyebarannya melalui grup Whatsapp atau langsung ke koperasi yang belum memiliki Sertifikat NIK



# BAB VI

# PENUTUP

01

Simpulan

02

Rekomendasi



# SIMPULAN

Setelah diadakan implementasi kegiatan latsar terkait upaya peningkatan sertifikat NIK koperasi, belum ada koperasi yang mengajukan permohonan sertifikat NIK ke Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan (DKUKMP) kota Bontang. Hal ini disebabkan koperasi-koperasi yang belum memiliki sertifikat NIK belum melaksanakan Rapat Anggota Tahunan (RAT) sehingga tidak dapat mengajukan permohonan pembuatan sertifikat NIK. Syarat utama koperasi untuk mendapatkan sertifikat NIK ialah sudah melaksanakan RAT selama 3 Tahun berturut-turut. Koperasi yang belum mengadakan RAT disebabkan kondisi internal koperasi tersebut bermasalah.

# REKOMENDASI

Berdasarkan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan selama proses aktualisasi dan habituasi, terdapat beberapa Rekomendasi yang diperlukan yaitu:

1. Kepada Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan Kota Bontang beserta Bapak/Ibu pejabat eselon untuk tetap memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis selama melaksanakan tugas, dan juga tidak segan untuk memberikan kritik yang membangun kepada penulis sehingga tetap melaksanakan tugas sesuai dengan nilai-nilai dasar Ber-AKHLAK.
2. Kepada seluruh rekan kerja Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan kota Bontang agar selalu memonitoring, mengevaluasi, maupun membantu dalam upaya meningkatkan jumlah sertifikat NIK koperasi mengingat karena keterbatasan waktu yang ada.
3. Kepada seluruh rekan kerja Bidang Koperasi Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan kota Bontang semoga tetap memberikan inovasi dan langkah penyempurnaan dalam melayani koperasi di Kota Bontang khususnya.

# DAFTAR PUSTAKA

LAN RI, 2019, “KESIAPSIAGAAN BELA NEGARA” Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III, Jakarta

LAN RI, 2019, “BERORIENTASI PELAYANAN” Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III, Jakarta

LAN RI, 2019, “AKUNTABEL” Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III, Jakarta

LAN RI, 2019, “KOMPETEN” Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III, Jakarta

Peraturan Menteri Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2020 tentang Pengawasan Koperasi

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Peraturan Walikota Bontang No 47 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perdagangan

LAN RI, 2019, “HARMONIS” Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III, Jakarta

LAN RI, 2019, “LOYAL” Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III, Jakarta

LAN RI, 2019, “ADAPTIF” Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III, Jakarta

LAN RI, 2019, “KOLABORATIF” Modul Pelatihan Dasar Calon Pegawai Negeri Sipil Golongan II dan Golongan III, Jakarta

LAN RI, 2017, “MANAJEMEN ASN” Modul Pelatihan Dasar Calon PNS, Jakarta